

**Feminisme Kritis: Kritik Kapitalisme Nancy Fraser
dan Relevansinya bagi Indonesia**

RINGKASAN DISERTASI



Amin Mudzakkir
(NIM: 0410108515)

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Jakarta
2021

Feminisme Kritis: Kritik Kapitalisme Nancy Fraser dan Relevansinya bagi Indonesia

**Disertasi ini dipertahankan sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar doktor di Sekolah Tinggi Filsafat
Driyarkara**

Sabtu, 27 November 2021

**Amin Mudzakkir
(NIM: 0410108515)**

**Promotor: Prof. Dr. J. Sudarminta
Ko-Promotor 1: Dr. Karlina Supelli
Ko-Promotor 2: Dr. Simon Petrus L. Tjahjadi**

**Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Jakarta
2021**

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi tentang pemikiran Nancy Fraser ini berfokus pada relasi antara kapitalisme dan gender. Diuraikan lebih lanjut dalam tema-tema mengenai keadilan, ruang publik, dan negara kesejahteraan, penulis memaparkan pemikiran kritis Fraser yang melihat bahwa sekarang cara melihat relasi antara kapitalisme melalui kultural, terpisah dari ekonomi-politik. Keterpisahan ini, yang melanda wacana dan praktik gerakan feminis, merupakan bagian dari proyek intelektual yang mengiringi pergeseran moda kapitalisme yang dikelola oleh negara ke kapitalisme neoliberal.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan tentang kapitalisme kembali mengemuka. Krisis ekonomi yang melanda sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, pada tahun 2008 memunculkan lagi berbagai kritik kapitalisme yang sekian lama terkubur di bawah permukaan. Aksi *occupy* Wall Street, New York, secara simbolis menandai itu.¹ Di tataran akademis, beberapa karya baru di bidang ini terbit. Ekonom Thomas Piketty, misalnya, menyita perhatian publik karena berhasil menunjukkan bahwa sejak tahun 1970-an kapitalisme memang terbukti meningkatkan ketimpangan sosial.²

Akan tetapi, bahkan sejak awal, kritik kapitalisme pada dasarnya bias gender. Pendapat ini telah menjadi kegelisahan klasik para feminis, khususnya mereka yang bertolak dari teori-

¹ Lihat ulasan historis-struktural tentang mengapa gerakan seperti itu bisa muncul di Amerika Serikat yang sebelum itu publiknya terlihat skeptis dengan perubahan yang radikal dalam Nikos Sotirakopoulos, *The Rise of Lifestyle Activism: From New Left to Occupy* (London: Palgrave Macmillan, 2016).

² Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Cambridge/London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014).

teori Marxisme, sehingga mereka berusaha membangun suatu kritik kapitalisme yang mengikutsertakan pengalaman perempuan dalam pembahasannya. Namun, sejak 1980-an usaha ini agak tenggelam setelah para feminis lebih tertarik mengikuti perdebatan terkait dengan isu-isu keragaman kultural daripada kesetaraan ekonomi politik. Belakangan, setelah krisis ekonomi 2008, usaha untuk mendekatkan kembali perjuangan feminisme dan kritik kapitalisme dimulai. Sejumlah publikasi menekankan pentingnya aspek-aspek non-ekonomis, yaitu apa yang oleh Karl Marx disebut reproduksi sosial, yang selama ini terabaikan dalam kritik kapitalisme.³ Khususnya dalam konteks Amerika Serikat, publikasi para feminis memperlihatkan bagaimana kapitalisme “*as we know it*” berdampak buruk tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga terutama bagi dunia reproduksi sosial masyarakat secara keseluruhan.⁴

Nancy Fraser adalah seorang feminis yang sejak awal konsisten mempermasalahkan kapitalisme. Pengajar filsafat dan

³ Dua publikasi terbaru di bidang ini, misalnya, adalah Heather A. Brown, *Marx on Gender and the Family: A Critical Study* (Leiden/Boston: Brill, 2012) dan karya lama Lisa Vogel (terbit 1983) yang diterbitkan ulang, *Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory* (Leiden/Boston: Brill, 2013). Belakangan, mereka fokus pada dimensi reproduksi kapitalisme yang terabaikan dalam kajian-kajian tentang kapitalisme. Lihat, misalnya, Tithi Bhattacharya (ed.), *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression* (London: Pluto, 2016).

⁴ Istilah “*as we know it*” merujuk pada pidato Presiden Bill Clinton pada 1993 yang mengumumkan “*end welfare as we know it*”, sebuah pidato yang menandai puncak pembangunan ekonomi politik neoliberal di Amerika Serikat. Ulasan kritis dari sudut pandang feminis terhadap itu bisa dibaca di J. K. Gibson-Graham, *The End of Capitalism As We Know It* (Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 1996). Mengenai tinjauan sejarah yang lebih panjang, lihat Charles Nobles, *Welfare As We Knew It: A Political History of the American Welfare State* (New York/Oxford: Oxford University Press, 1997).

politik di The New School of Social Research, New York, ini menyampaikan bahwa kapitalisme bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan sebagai “tatanan sosial yang terlembagakan”.⁵ Cakupannya, karena itu, meliputi tidak hanya ekonomi, tetapi juga reproduksi sosial, ekologi, dan kuasa publik. Dalam pengertian ini, ekonomi pada dasarnya hanya menempati “latar depan” dari kapitalisme, sedangkan reproduksi sosial, ekologi, dan kuasa publik adalah “latar belakang”-nya. Masalahnya, kata Fraser, sebagian besar kritik kapitalisme terfokus pada yang pertama, tetapi mengabaikan yang kedua, padahal di wilayah latar belakang itu terdapat “syarat kemungkinan” (*condition of possibility*) bagi yang pertama. Dengan kalimat lain, kapitalisme tidak akan berjalan jika tidak disokong oleh yang kedua. Fraser menulis “pekerja upahan tidak bisa ada jika tidak ada pekerjaan rumah, pengasuhan anak, sekolah, perawatan afektif dan sejumlah kegiatan lain yang membantu menghasilkan generasi baru pekerja dan mengisi pekerja yang sudah ada, serta untuk memelihara ikatan sosial dan pemahaman bersama”.⁶

Bertolak dari itu, kritik kapitalisme dalam pemikiran Fraser mesti mempertimbangkan hubungan di antara kedua wilayah ontologi sosial yang sering dipisahkan secara ketat itu. Perjuangan emansipasi adalah “perjuangan lintas-batas” yang berusaha melenturkan pemisahan yang ketat antara latar depan dan latar belakang kapitalisme karena persis di batas-batas itu

⁵ Nancy Fraser, “Behind Marx Abode: For an Expanded Conception of Capitalism”, *New Left Review*, No. 86, Maret-April 2014. Artikel ini dikembangkan lebih lanjut dalam Nancy Fraser dan Rahel Jaeggi, *Capitalism: A Conversation in Critical Theory* (Cambridge: Polity Press, 2019).

⁶ Nancy Fraser, “Behind Marx Abode”, *New Left Review*, No. 86, Maret-April 2014.

terdapat potensi emansipasi yang secara imanen ada dalam pengalaman masyarakat kapitalis itu sendiri. Gagasan ini menarik dikaji karena merupakan terobosan penting dalam perdebatan feminisme, filsafat politik, dan teori sosial, khususnya yang berakar pada tradisi teori kritis Mazhab Frankfurt.

Pemikiran Fraser lahir dari dialektika antara feminisme dan teori kritis.⁷ Dari sini lahir istilah “feminisme kritis” yang menawarkan suatu kritik sosial yang partikular berbasis pada filsafat normatif yang universal.⁸ Dari sisi sejarah feminisme, feminisme kritis Fraser adalah bagian dari gerakan feminis gelombang kedua yang tumbuh pada tahun 1960-an bersama dengan kelompok Kiri Baru dan gerakan sosial lainnya. Berbeda dengan feminisme gelombang pertama yang terbatas pada reformasi di bidang pendidikan dan sistem politik, feminisme gelombang kedua bergerak lebih jauh ke bidang isu keadilan sosial yang lebih luas. Sementara itu, di sisi sejarah teori kritis, feminisme kritis Fraser adalah bagian dari gagasan generasi ketiga Mazhab Frankfurt yang berusaha mereformulasi kritik terhadap situasi masyarakat kapitalis kontemporer dengan penekanan pada isu gender dan perempuan. Generasi pertama dan generasi kedua telah menaruh minat terhadap isu tersebut, tetapi generasi ketiga yang salah satu wakil terkemukanya

⁷ Margot Canaday, “Promising Alliances: The Critical Feminist Theory of Nancy Fraser and Seyla Benhabib”, *Feminist Review*, No. 74, 2003.

⁸ Nancy Fraser dan Linda Nicholson, “Social Criticism without Philosophy: An Encounter between Feminism and Postmodernism”, *Theory, Culture, & Society*, Vol. 5, Juni 1988.

adalah Fraser membentuk suatu corak pemikiran tersendiri yang khas dan tentunya penting dipelajari lebih lanjut.⁹

Dalam literatur-literatur yang ada, “feminisme kritis” sering disebut juga sebagai “teori feminisme kritis”. Pada dasarnya keduanya merujuk pada hal yang sama, yaitu suatu pendekatan yang mau mengangkat pengalaman perempuan ke ranah teoretis, tetapi tetap berbasis pada praksis perubahan sosial yang emansipatoris. Mengikuti pendapat Deborah Rhode yang mengelaborasi pendekatan tersebut dalam kajian-kajian hukum, feminisme kritis mempunyai sejumlah premis yang bekerja setidaknya pada tiga tataran.¹⁰ Pertama, pada tataran politis, feminisme kritis bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah pokok keadilan di sebuah masyarakat. Kedua, pada tataran substantif, feminisme kritis menjadikan gender sebagai fokus dari analisis sosial. Dalam kajian-kajian hukum yang ditelaah oleh Rhode, ia membangun ulang praktik-praktik legal yang selama ini mengeluarkan, merendahkan, dan mengabaikan perhatian perempuan. Ketiga, pada tataran metodologis, feminisme kritis berupaya menawarkan suatu kerangka yang beragam sebagai upaya menangkap pengalaman perempuan yang juga beragam. Tidak ada metodologi tunggal yang bisa diterapkan secara universal. Akan tetapi, terutama terkait dengan aspek metodologis, bukan berarti feminisme kritis menerima begitu saja relativisme kultural. Karena itu, secara teoretis, ia mempunyai problematik ketika ditautkan dengan posmodernisme, meski hingga tahap tertentu ia

⁹ Amy Allen, “Third Generation Critical Theory: Benhabib, Fraser, and Honneth”, dalam Rosi Braidotti (ed.), *The History of Continental Philosophy*, Vol. 7, 2010, hlm. 129-148.

¹⁰ Deborah L. Rhode, “Feminist Critical Theories”, *Stanford Law Review*, Feb., 1990, Vol. 42, No. 3, hlm. 61

membutuhkannya terutama sebagai kerangka untuk menangkap dan memahami realitas masyarakat yang plural.

Dalam filsafat, pertautan di antara aliran pemikiran sudah lazim terjadi dan dengan cara itulah filsafat terus memberikan relevansi. Di kalangan feminis sendiri, misalnya, terjadi tegangan mengenai sejauh mana penggunaan analisis ekonomi politik yang bertolak dari tradisi Marxisme bisa bertaut dengan analisis patriarki yang dikembangkan feminisme dalam membantu menerangi perjuangan gerakan perempuan. Meski Heidi Hartmann menyebut pertautan tersebut sebagai “pernikahan tidak bahagia” (*the unhappy marriage*), kenyataannya dari proses itu baik Marxisme maupun feminisme bisa berkembang.¹¹ Tegangan yang sama terjadi ketika feminisme berjumpa dengan pascamodernisme dan pascastrukturalisme pada tahun 1980-an di mana saat itu Fraser dan sejumlah koleganya terlibat dalam perdebatan sengit mengenai sejauh mana keduanya bisa bertemu dan berguna secara praktis dalam perjuangan untuk mencapai emansipasi.¹²

Akan tetapi, pertautan antara feminisme dan kapitalisme terjebak pada “hubungan-hubungan berbahaya” (*dangerous liaisons*).¹³ Menurut Fraser, kritik feminisme gelombang kedua

¹¹ Heidi Hartmann, “The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards A More Progressive Union” dalam Lydia Sergent, *Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism* (Montreal: Black Rose Books, 1981). Buku lainnya yang merangkum perdebatan ini adalah Zillah R. Einstein, *Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminist* (London/New York: Monthly Review Press, 1979).

¹² Linda J. Nicholson (ed.), *Feminism/Postmodernism* (London/New York: Routledge: 1990).

¹³ Hester Eisenstein, “A Dangerous Liaison? Feminism and Corporate Globalization”, *Science & Society*, Vol. 69, No. 3, Juli 2005, hlm. 457-518. Istilah “*dangerous liaison*” digunakan juga oleh Aruzza untuk membahas

di era 1960-an terhadap kapitalisme yang dikelola negara justru menjadi basis legitimasi kapitalisme neoliberal di era 1980-an dan kemudian hingga sekarang. Fraser menyebut adanya perkembangan corak kapitalisme yang kurang disadari oleh sebagian feminis. Kritik feminis terhadap ekonomisme, etatisme, androsentrisme, dan Wesphalianisme yang inheren dalam praktik negara kesejahteraan selama periode kapitalisme yang dikelola negara justru dikooptasi atau diresignifikansi oleh kapitalisme neoliberal untuk melegitimasi coraknya yang baru. Fraser menyebut belokan ini sebagai “kelicikan sejarah” (*the cunning of history*) yang sangat berbahaya bagi feminisme.¹⁴

Tentu saja keprihatinan Fraser bukan sesuatu yang sama sekali baru karena pada dasarnya itu merupakan kelanjutan dari tradisi kritik Mazhab Frankfurt yang telah terbangun sejak tahun 1924.¹⁵ Max Horkheimer, salah satu tokoh terpentingnya dari generasi pertama, mengatakan bahwa sebuah teori dikatakan teori kritis jika ia mampu secara reflektif menghindarkan diri dari belitan (*entanglement*) logika kapital. Pernyataan ini dikemukakan seturut dengan definisinya mengenai teori kritis yang mesti dibedakan dengan teori tradisional.¹⁶ Kritik ini

relasi lama antara Marxisme dan feminisme. Lihat, Cinzia Arruzza, *Dangerous Liaisons: The Marriage and Divorce of Marxism and Feminism* (Wales: Merlin Press, 2013).

¹⁴ Nancy Fraser, *Fortunes of Feminism: From State-Manged Capitalism to Neoliberal Crisis* (London/New York: Verso, 2013), hlm. 209.

¹⁵ Ulasan historis mengenai teori kritis Mazhab Frankfurt generasi pertama, lihat Martin Jay, *The Dialectical Imagination: A History of Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950* (The University of California Press, 1973).

¹⁶ Mark Horkheimer, “Traditional and Critical Theory” dalam Mark Horkheimer, *Critical Theory: Selected Essays* (New York: The Continuum Publishing, 2002).

kemudian dikenal sebagai kritik imanen.¹⁷ Bergerak lebih jauh dari para pendahulunya, Fraser membawa kritik imanen ke kancah feminisme.¹⁸ Bersama dengan generasi ketiga teori kritis lainnya, Fraser mengembangkan suatu kritik normatif yang didasarkan pada pengalaman empiris yang kongkret. Tentu saja, seperti para pendahulu teori kritis lainnya, sasaran tembaknya adalah dominasi dalam segala macam bentuknya, terutama, meski tidak terbatas pada, gender. Namun, agak berbeda dengan sejawat teoretisi kritis yang berbasis di Eropa, seperti Axel Honneth, pemikiran Fraser diwarnai oleh semangat “belokan pragmatis” (*pragmatic turn*). Seperti diakuinya sendiri, pemikir seperti Richard Rorty dan Richard J. Bernstein yang merupakan tokoh pragmatisme Amerika cukup berpengaruh terhadap pemikirannya.¹⁹

¹⁷ Perdebatan mengenai kritik imanen merupakan pokok dari perdebatan dalam tradisi teori kritis Mazhab Frankfurt. Lihat, Robert J. Antonio, “Immanent Critique as the Core of Critical Theory: Its Origin and Development in Hegel, Marx and Contemporary Thought”, *The British Journal of Sociology*, Vol. 32, No. 3 (September 1981).

¹⁸ Amy Allen, “Critical Theory and Feminism” dalam Peter E. Gordon, Espen Hammer, dan Axel Honneth (ed.), *The Routledge Companion to the Frankfurt School* (London/New York, 2019)

¹⁹ Nancy Fraser, “Solidarity or Singularity: Richard Rorty between Romanticism and Technocracy” dalam Nancy Fraser, *The Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989), hlm. 95; Mengenai Richard J. Bernstein, lihat Nancy Fraser dan Seyla Benhabib, “Introduction” dalam Nancy Fraser dan Seyla Benhabib (ed.), *Pragmatism, Critique, Judgment: Essays for Richard J. Bernstein* (Cambridge: The MIT Press, 2004), hlm. vii-xix.

Akan tetapi, di kalangan teoretisi kritis sendiri, kritik kapitalisme seperti menghadapi kebuntuan.²⁰ Yang dimaksud adalah kritik dalam pengertian ekonomi politik bergeser ke kritik dalam pengertian kultural. Pada Habermas, misalnya, kritik ekonomi politik telah digantikan oleh kritik etika diskursus yang lebih berbasis pada filsafat bahasa. Dalam situasi ini, muncul pemikir seperti Axel Honneth yang berusaha mereformulasi teori kritis dengan titik pijak “perjuangan untuk rekognisi”.²¹ Namun, Fraser tidak sepakat dengan reformulasi itu karena dinilainya terlalu psikologistik dan menjauh dari tujuan mula teori kritis yang dirumuskan Marx sebagai “klarifikasi diri perjuangan dan harapan zaman”.²²

Untuk membangun argumennya, Fraser telah melahirkan publikasi sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Secara umum karya-karyanya bisa dibagi ke dalam tiga periode kepenulisan. Periode pertama, selama tahun 1980-an, berisi tulisan yang menyoroti relasi antara gender, teori kritis, dan kekuasaan.²³ Pada periode ini secara intensif Fraser berusaha mendialogkan Habermas dan pascastrukturalisme dan pascamodernisme, khususnya Foucault, dalam menganalisis kondisi-kondisi yang melahirkan dominasi terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Periode kedua, selama tahun 1990-an, berisi tulisan

²⁰ Albena Azmanova, *Capitalism on Edge: How Fighting Precarity Can Achieve Radical Change Without Crisis or Utopia* (New York: Columbia University Press, 2020).

²¹ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition* (Cambridge: The MIT Press, 1996).

²² Dikutip dalam Fraser, *Fortune of Feminism*, hlm. 19. Fraser merujuk pada karya Karl Marx, “Letter to A Ruge, September 1843”, *Karl Marx: Early Writing* (New York: Vintage Books, 1975).

²³ Nancy Fraser, *Unruly Practice: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*, 1989.

yang mengkaji ulang teori-teori keadilan.²⁴ Interlokutor utamanya pada periode ini adalah Axel Honneth. Mereka berdua menerbitkan sebuah buku bersama yang memperlihatkan dua corak teori kritis dalam memahami keadilan. Periode ketiga, setelah 2013, berisi tulisan yang merefleksikan posisi feminisme dan teori kritis di era krisis neoliberal saat ini.²⁵ Dapat dikatakan

²⁴ Nancy Fraser *Justice Interruptus: Critical Reflection on the "Postsocialist" Condition* (London/New York: Routledge, 1997); Nancy Fraser dan Axel Honneth, *Redistribution or Recognition: A Political-Philosophical Exchange*, (London: Verso, 2003); Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World* (New York: Columbia University Press, 2010).

²⁵ Nancy Fraser, "A Triple Movement?: Parsing the Politics of Crisis after Polanyi", *New Left Review*, No. 81, Mei-Juni 2013; Nancy Fraser, "Can Society be Commodities All the Benhabib, "Introduction" dalam Nancy Fraser dan Seyla Benhabib (ed.), *Pragmatism, Critique, Judgment: Essays for Richard J. Bernstein* (Cambridge: The MIT Press, 2004), hlm. vii-xix.

²⁵ Albenaz Azmanova, *Capitalism on Edge: How Fighting Precarity Can Achieve Radical Change Without Crisis or Utopia* (New York: Columbia University Press, 2020).

²⁵ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition* (Cambridge: The MIT Press, 1996).

²⁵ Dikutip dalam Fraser, *Fortune of Feminism*, hlm. 19. Fraser merujuk pada karya Karl Marx, "Letter to A Ruge, September 1843", *Karl Marx: Early Writing* (New York: Vintage Books, 1975).

²⁵ Nancy Fraser, *Unruly Practice: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*, 1989

²⁵ Nancy Fraser *Justice Interruptus: Critical Reflection on the "Postsocialist" Condition*, 1997; Nancy Fraser dan Axel Honneth, *Redistribution or Recognition: A Political-Philosophical Exchange*, 2001; Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, 2010.

²⁵ Nancy Fraser, "A Triple Movement?: Parsing the Politics of Crisis after Polanyi", *New Left Review*, No. 81, Mei-Juni 2013; Nancy Fraser, "Can Society be Comm Way Down? Post-Polanyian Reflections on Capitalist Crisis", *Economy and Society*, Vol. 43, No. 4, 2014; Nancy Fraser, "Behind

tulisan-tulisan periode terakhir ini merupakan retrospeksi Fraser terhadap pandangan-pandangan sebelumnya dengan penekanan yang lebih kuat pada apa yang disebutnya kritik kapitalisme yang diperluas.

Studi ini lebih memilih pendekatan tematis. Seluruh pemikiran Fraser dibagi ke dalam tiga tema utama, yaitu keadilan, ruang publik, dan negara kesejahteraan. Dalam ketiga tema ini, Fraser menunjukkan adanya berbagai tegangan yang mesti dihadapi feminisme kritis di era kapitalisme neoliberal. Tidak mudah memang, sebab masalahnya bukan sekadar memilih “marketisasi pasar” atau “proteksi sosial” sebagaimana dikemukakan oleh Karl Polanyi ketika menanggapi krisis kapitalisme 1930-an.²⁶ Situasi sekarang jauh lebih kompleks, sehingga emansipasi mesti dicari di antara dua tegangan Polanyian tersebut. Secara kreatif Fraser menggali tidak hanya Polanyi, tetapi juga, cukup pasti, Habermas dan Marx untuk merumuskan ulang kritik terhadap kapitalisme dalam persoalan keadilan, ruang publik, dan negara kesejahteraan.²⁷ Pilihan untuk mengkaji Fraser secara tematis didasarkan oleh pertimbangan bahwa tiga tema tersebut memang selain mewakili perkembangan pemikiran Fraser, tetapi juga di dalam masing-masing tema itu terdapat dialektika yang

Marx’s Hidden Abode: For an Expanded Conception of Capitalism”, *New left Review*, No. 86, Maret-April 2014; Nancy Fraser, “Contradiction of Capital and Care”, *New Left Review* No. 100, Juli-Agustus 2016; Nancy Fraser, “Why Two Karls are Better than One: Integrating Polanyi and Marx in a Critical Theory of the Current Crisis”, Working Paper 1/2017, DFG-Kollegforscher Innengruppe Postwachstumsgesellschaften.

²⁶ Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press, 2001 [1944]).

²⁷ Simak wawancara Nancy Fraser dan Wen Xiaoping, “Nancy Fraser on Marx and Habermas”, *International Critical Thought*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 259-267.

memperlihatkan kemampuan feminisme kritis merefleksikan “ambivalensi” dirinya.²⁸

Studi tentang pemikiran Fraser telah dilakukan sejumlah sarjana mengingat kontribusi pentingnya bagi filsafat politik dan teori sosial kontemporer, tetapi umumnya mereka hanya mengkaji satu aspek tertentu dari pemikirannya. Beberapa buku editorial yang dirancang khusus untuk mengkaji Fraser telah diterbitkan,²⁹ termasuk satu karya *Festschrift* yang menghimpun beragam komentar dan ulasan rekan-rekan Fraser terhadap tema-tema penting pemikirannya dalam empat puluh tahun terakhir.³⁰ Selain itu, disertasi dan tesis juga telah ditulis baik yang secara khusus menganalisis Fraser maupun yang diperbandingkan dengan pemikir lainnya.³¹ Akan tetapi, sejauh pelacakan saya, belum ada satu pun studi tentang Fraser yang menyuguhkan pemikirannya secara komprehensif. Oleh karena itu, studi ini adalah yang pertama melakukannya. Kebaruan yang lebih

²⁸ Istilah “ambivalensi” ini adalah istilah Fraser yang disampaikannya ketika merefleksikan evolusi kritik feminisme terhadap babakan-babakan kapitalisme. Lihat, Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 238-240.

²⁹ Kevin Olson (ed.), *Adding Insult to Injury: Nancy Fraser Debates Her Critics* (London/New York: Verso, 2008); Kate Nash (ed.), *Transnationalizing the Public Sphere* (Cambridge: Pluto Press, 2014); Tery Lovell (ed.), (Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu (New York/ London: Routledge, 2007),

³⁰ Banu Bargu dan Chiara Bottici (ed.), *Feminism, Capitalism, and Critique: Essays in Honor of Nancy Fraser* (Pargrave Macmillan, 2017)

³¹ Misalnya, Heini Kinnunen, *The Public Sphere, Feminism, and the Left: The Concept of the Public Sphere in Three Feminist Theorists' Works*, disertasi doktor, The Department of Cultures University of Helsinki, 2019 i; Brett J. Reader, *Insult, Injury and Impact: Social Policy in the Context of Recognition and Redistribution*, tesis S2, University of Colorado, 2012; Joseph Murphy, *Marxism, Racism, and Capitalism: A Critical Examination of Nancy Fraser*, tesis S2, Georgia State University, 2019.

penting lagi adalah studi ini mau menunjukkan relevansi pemikiran Fraser dalam memahami gejala sosial di Indonesia dan memberikan perspektif yang tepat. Relevansi ini terutama terkait dengan posisi Fraser yang sejak awal menyadari kompleksitas masyarakat kapitalis yang beragam dan berjenjang seperti Indonesia.

1. 2. Permasalahan

Sebagaimana telah dikatakan di awal, studi ini mengkaji pemikiran Fraser yang mempermasalahkan keterpisahan kritik kapitalisme dan analisis gender dalam wacana dan praktik keadilan, ruang publik, dan negara kesejahteraan. Keterpisahan ini terjadi dalam situasi historis dan intelektual tertentu. Oleh karena itu, studi ini juga memperluas cakupan situasi yang melahirkan keterpisahan tersebut dengan membawa pemikiran Fraser ke dalam konteks Indonesia. Diturunkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, permasalahan yang dibahas oleh studi ini adalah berikut:

1. Apa dasar-dasar historis dan intelektual feminisme kritis Fraser?
2. Bagaimana feminisme kritis Fraser diuraikan dalam perdebatan mengenai keadilan, ruang publik, dan negara kesejahteraan?
3. Apa relevansi feminisme kritis Fraser bagi Indonesia?

1. 3. Tesis

Tesis utama yang mau dipertahankan dalam studi ini adalah bahwa kritik kapitalisme tidak akan berhasil jika tidak mengikutsertakan analisis gender dan, sebaliknya, analisis gender tidak akan berhasil jika mengabaikan kritik kapitalisme. Keserentakan antara kritik kapitalisme dan analisis gender ini

mengemuka dalam pemikiran Nancy Fraser mengenai keadilan, ruang publik, dan negara kesejahteraan yang mempunyai relevansi kuat dengan masalah-masalah terkait di Indonesia.

1. 4. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Karya-karya Fraser adalah sumber primer yang dianalisis dan direkonstruksi untuk menjawab permasalahan. Hingga sekarang dia telah menerbitkan setidaknya delapan buku dan sejumlah artikel yang muncul di berbagai jurnal dan buku-buku editorial lainnya. Langkah-langkah yang ditempuh diuraikan berikut:

Pada bab 2, studi ini melacak sejumlah karya-karya Fraser, selain sumber-sumber lain yang sifatnya sekunder, untuk membangun gambaran umum tentang feminisme kritis. Prolog yang ditulisnya dalam *Fortunes of Feminism*, yang menyuguhkan tinjauan Fraser tentang sejarah feminisme gelombang kedua, adalah pembuka untuk memasuki diskusi lebih luas.³² Karya ini secara khusus menyoroti tahapan dan belokan sejarah dalam perkembangan feminisme dan problematikanya. Fraser mengkritik kecenderungan feminisme kontemporer yang terjebak pada politik identitas. Akibatnya, alih-alih merealisasikan emansipasi, feminisme justru menjadi pelayan neoliberalisme. Dalam buku ini kritik Fraser terhadap kapitalisme terdengar lebih keras daripada sebelumnya, terkait dengan krisis kapitalisme 2008 yang melanda AS dan negara-negara lainnya. Selain itu, masih pada bab 2, saya juga mengacu pada *Unruly Practice: Power, Discourse, and Gender in*

³²Nancy Fraser, *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis* (London/New York: Verso, 2013).

Contemporary Social Theory.³³ Karya ini berisi sejumlah tulisan yang merupakan tanggapan Fraser terhadap tantangan pascastrukturalisme dan pascamodernisme, khususnya pemikiran Foucault, dan sejauh mana feminisme bisa menerima dan menerapkannya dalam analisis serta perjuangan mereka. Disituasikan oleh lingkungan akademis AS pada dekade 1980-an yang ditandai oleh menguatnya pandangan neo-konservatif, Fraser berpendapat tawaran pascastrukturalis dan pascamodernis bisa memperkaya wawasan feminisme mengenai kekuasaan dalam konteks sosial tertentu, meski ia kurang memberikan dasar normatif yang memadai dalam mengatasi masalah kongkret yang dihadapinya. Sebagai alternatif, Fraser mengusulkan agar konsepsi kekuasaan dari Foucault mesti dipadukan dengan teori kritis Habermas yang dalam beberapa hal mempunyai keterbatasan. Perpaduan antara Foucault dan Habermas merupakan salah satu dasar intelektual feminisme kritis.

Selanjutnya, pada bab 3 tentang keadilan, studi ini mengkaji karya-karya Fraser yang terbit terutama pada tahun 1990-an dan 2000-an. Ada tiga buku pokok yang dirujuk, yaitu *Justice Interruptus*,³⁴ *Redistribution or Recognition?*,³⁵ dan *Scales of Justice*.³⁶ Buku pertama adalah debut awal Fraser

³³ Nancy Fraser *Unruly Practice: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory* (M Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989)

³⁴ Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist Condition"* (London/New York: Routledge, 1997).

³⁵ Nancy Fraser and Axel Honneth, *Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange* (London/New York: Verso, 2003).

³⁶ Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World* (New York: Columbia University Press, 2010).

dalam perdebatan filsafat keadilan. Di buku ini dia mengangkat isu mengenai tantangan pasca jatuhnya komunisme di akhir 1980-an terhadap teori-teori keadilan. Namun, apa yang kemudian disebut Fraser sebagai kondisi pascasosialis itu tidak hanya merujuk pada runtuhnya Soviet dan negara-negara komunis lainnya, tetapi juga pergeseran orientasi intelektual yang mengiringi dinamika kapitalisme. Buku kedua berisi “suatu pertukaran politik-filosofis” dengan Axel Honneth. Keduanya adalah generasi ketiga teori kritis yang sama-sama mau membawa kembali kapitalisme ke dalam kancah teori kritis, tetapi orientasinya berbeda. Sementara Fraser yang bertitik tolak juga dari feminisme mau menempatkan keadilan dalam analisis yang dualistik, Honneth merangkumnya secara monistik dalam konsep perjuangan untuk rekognisi. Buku ketiga adalah pengembangan dari pemikiran Fraser yang terfokus pada tantangan filsafat keadilan di hadapan globalisasi. Sebagaimana tercermin dalam judulnya, buku ini memproblematisasi cakupan teori-teori keadilan yang menurut Fraser perlu mempertimbangkan ulang daya eksplanasi dan kekuatan normatifnya di luar batas-batas negara-bangsa.

Kemudian, pada bab 4, studi ini menganalisis dan merekonstruksi pemikiran Fraser mengenai ruang publik terutama berdasar pada dua tulisan Fraser yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to Actually Existing Democracy” yang termuat dalam *Justice Interruptus*,³⁷ sedangkan yang kedua adalah “Transnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in Postwestphalian

³⁷ Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflection on the “Postsocialist” Condition* (New York/London: Routledge, 1997).

World” yang dimuat dalam *Scales of Justice*.³⁸ Keduanya memperlihatkan evolusi pemikiran Fraser mengenai ruang publik. Yang menarik adalah titik tolak keduanya adalah teori ruang publik Habermas. Pada yang pertama problematik yang diangkat lebih pada kelupaaan akan diferensiasi gender dan kelas, sedangkan pada yang kedua pokok kritik Fraser adalah bingkai dari teori ruang publik itu sendiri.

Sementara itu, pada bab 5 tentang negara kesejahteraan, studi ini merujuk pada tulisan-tulisan Fraser yang terbit merentang sejak awal karir kesajarannya hingga saat ini. Dalam *Unruly Practices*, dia menulis tiga bab yang fokus pada isu ini. Selain itu, masih pada periode awal, ada sejumlah artikel Fraser yang mengulas secara khusus kebijakan kesejahteraan di era itu.³⁹ Selanjutnya, keprihatinan Fraser mengenai negara kesejahteraan juga muncul dalam *The Fortune of Feminism* yang memuat setidaknya empat artikel terkait dengan isu ini. Lebih belakangan lagi, tema kesejahteraan menjadi kepedulian pokok Fraser dalam beberapa publikasi terakhirnya di jurnal akademis.⁴⁰ Ini tidak lepas dari perkembangan terbaru

³⁸ Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World* (New York: Columbia University Press, 2010).

³⁹ Fraser, N. “Talking about Needs: Interpretive Contests as Political Conflicts in Welfare-State Societies”. *Ethics*, Vol. 99, No. 2, 1989, hlm. 291–313; Nancy Fraser, “Clintonism, Welfare, and the Antisocial Wage: The Emergence of a Neoliberal Political Imaginary”, *Rethinking Marxism*, Vol. 6, No.1, 1993.

⁴⁰ Nancy Fraser, “A Triple Movement: Parsing the Politics of Crisis after Polanyi”, *New Left Review*, No. 81, Mei-Juni 2013; Nancy Fraser, “Can society be commodities all the way down? Post-Polanyian reflections on capitalist crisis”, *Economy and Society*, Vol. 43, No. 4, November 2014; Nancy Fraser, “Legitimation Crisis: On the Political Contradiction of Financialized Capitalism”, *Critical Historical Studies*, Vol. 2, No. 2, 2015;

kapitalisme neoliberal yang mengalami krisis di pusatnya sendiri di AS yang tentu saja berdampak luas bagi tatanan sosial secara keseluruhan.⁴¹

Nancy Fraser, "Contradiction of Capital and Care", *New Left Review*, No. 100, Juli-Agustus 2016.

⁴¹ Tema ini mengemuka dalam tiga buku Fraser yang terbit paling belakangan, yaitu *Capitalism: A Conversation in Critical Theory* (Cambridge: Polity Press, 2018), *Feminism for the 99%: A Manifesto* (London/New York: Verso, 2019), dan *The Old Is Dying and the New Cannot Born: From Progressive Neoliberalism to Trump and Beyond* (London/New York: Verso, 2019). Buku pertama ditulis bersama dengan Rahel Jaeggi ini unik karena disusun dengan model dialog. Dua orang feminis dan teoretisi kritis perempuan terkemuka ini memperdebatkan bagaimana kita mengkonseptualisasikan, mengkritisi, menghistorisasi, dan mengkontestasi kapitalisme di abad ke-21. Pendapat Fraser dalam buku ini adalah pengulangan dan penguatan kembali pokok-pokok pemikirannya yang telah terbit dalam berbagai jurnal, umumnya di *New Left Review* sejak 2013. Namun, lebih dari itu, karya ini adalah retrospeksi Fraser terhadap pemikirannya di periode sebelumnya yang dibingkai ulang dalam kerangka besar kritik kapitalisme. Buku kedua, seperti tertera di judulnya, buku ini adalah karya yang ditulis dengan retorika populis, hampir seperti pamflet, oleh tiga orang feminis dan teoretisi kritis perempuan terkemuka dalam menyikapi perkembangan feminisme di hadapan krisis kapitalisme neoliberal. Secara eksplisit karya ini menyerang sejawat feminisme lainnya yang dianggap berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan neoliberal. Buku ketiga diangkat dari sebuah artikel di *American Affairs* dengan tambahan wawancara Fraser dan Bhaskar Sunkara. Seperti tercantum pada anak judulnya, buku ini memang lebih fokus pada problematik kapitalisme di AS terutama sejak era Reagan hingga Trump dan bagaimana feminisme mengambil posisi dalam situasi itu. Secara kritis Fraser memperlihatkan ambivalensi gerakan feminis di hadapan neoliberalisme baik yang berwajah progresif maupun reasioner. Yang pertama, yang diwakili misalnya oleh figur Hillary Clinton, memang sensitif dengan isu perbedaan kultural, tetapi sangat pro-pasar. Sebaliknya, yang kedua yang diwakili oleh sosok Donald Trump bersikap anti-perbedaan kultural dan, pada saat yang sama, juga sangat pro-pasar. Bagi Fraser keduanya tidak memuaskan, sehingga

Terakhir, pada bab 6, dengan menggunakan literatur-literatur penting mengenai kewarganegaraan, feminisme Islam, dan politik kesejahteraan di Indonesia, studi ini memperlihatkan relevansi—sekaligus juga keterbatasan—pemikiran Fraser dalam tema-tema tersebut. Relevansinya terutama terkait dengan kritik Fraser terhadap reorientasi intelektual dalam teori sosial dan filsafat politik dari pendekatan ekonomi-politik ke kultural, sedangkan keterbatasannya adalah pemikiran Fraser secara empiris kurang akurat dan secara normatif kurang sensitif terhadap pengalaman masyarakat kapitalis di negara pascakolonial dengan populasi mayoritas Muslim seperti Indonesia.

2. PEMBAHASAN

2.1. Dasar-dasar Historis dan Intelektual Feminisme Kritis Fraser

Dapat dikatakan feminisme sosialis dan teori kritis Mazhab Frankfurt adalah dua tradisi intelektual paling berpengaruh dalam membentuk feminisme kritis. Keduanya memberikan kerangka bagi Fraser untuk merefleksikan perjalanan sejarah feminisme, khususnya feminisme gelombang kedua yang

dibutuhkan suatu alternatif yang mampu menghubungkan kembali feminisme dengan cita-cita emansipatorisnya, khususnya yang terkait dengan isu keadilan sosial.

berakar pada pengalaman dan cita-cita gerakan Kiri Baru tahun 1960-an. Karena itu, feminisme kritis Fraser bercorak anti-kapitalisme, meski kapitalisme yang dibayangkannya tentu saja mempunyai pengertian yang lebih luas daripada apa yang biasanya dipahami oleh kalangan Marxisme vulgar. Bagi Fraser, kapitalisme tidak hanya mencakup faktor produksi ekonomi, tetapi juga faktor reproduksi sosial. Argumen ini diangkat oleh Fraser dalam berbagai analisisnya mengenai keadilan, ruang publik, dan negara kesejahteraan.

Kerangka feminisme sosialis dan teori kritis Mazhab Frankfurt yang dintegrasikan oleh Fraser melahirkan suatu perspektif yang menarik. Menanggapi pergeseran modus kapitalisme dari kapitalisme yang dikelola negara ke kapitalisme neoliberal yang terjadi setelah tahun 1980-an, Fraser melihat pascamodernisme sebagaimana dirumuskan oleh Foucault sebagai sesuatu yang penting bagi feminisme. Konsepsi kekuasaan Foucault memberi kemampuan kepada para feminis dalam menganalisis gejala-gejala empiris secara lebih baik karena bisa menukik pada isu-isu mikro. Dengan ini, para feminis bisa berpikir secara historis. Akan tetapi, tendensi Foucault yang bersikap netral terhadap gejala-gejala empiris yang direfleksikannya membuat para feminis bisa kehilangan panduan normatif dalam menjalankan agenda-agenda emansipasi. Menurut Fraser, kalau hanya mengandalkan Foucault, mereka tidak bisa membedakan mana kekuasaan yang secara etis bisa diterima dan tidak bisa diterima. Kekurangan Foucault ini perlu diisi oleh Habermas. Konsepsi komunikasi Habermas bisa digunakan sebagai kerangka normatif untuk membangun diskursus yang berguna bagi perjuangan feminisme.

Bertolak dari perspektif tersebut Fraser kemudian merefleksikan bahwa sekarang terjadi resignifikasi kritik

kapitalisme yang membuatnya malah menjadi pelayan kapitalisme neoliberal. Resignifikansi terjadi karena sebagian feminis tidak menyadari adanya belokan sejarah yang membelit mereka, yang membuat kritik mereka terhadap model ekonomisme, androsentrisme, etatisme, dan Westphalianisme dari kapitalisme yang dikelola negara justru menjadi legitimasi bagi kapitalisme neoliberal. Pembahasan Fraser mengenai resignifikansi kritik ini merupakan temuan penting yang signifikan dalam perdebatan feminisme.

2.2. Feminisme Kritis dalam Keadilan, Ruang Publik, dan Negara Kesejahteraan

Isu keadilan dibahas pada bab 3. Bertolak dari analisis terhadap kondisi pascasosialis yang mengakibatkan pergeseran diskursus teori keadilan dari politik redistribusi ke politik rekognisi, Fraser mengajukan perspektif yang berupaya melihat keduanya bukan sebagai problematik yang terpisah, melainkan saling terkait. Dalam rangka itu, pengertian tentang politik rekognisi harus dipahami bukan sebagai realisasi diri seperti dikatakan Axel Honneth, melainkan sebagai status dalam pengertian Weberian. Ini untuk menghindari reifikasi identitas di satu sisi dan penempatan sumber daya yang keliru di sisi yang lain. Seseorang dikatakan mengalami ketidakadilan bukan hanya karena identitasnya tidak diakui, melainkan lebih karena statusnya dipinggirkan. Status di sini tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga pelembagaan nilai-nilai di masyarakat. Namun, menghadapi globalisasi, Fraser berpendapat teori keadilan juga membutuhkan teoretisasi yang memadai mengenai politik representasi, dimensi politik dari keadilan. Bersama dengan politik redistribusi dan politik rekognisi, politik

representasi membentuk suatu konstruksi teoretis tentang keadilan yang multidimensional. Bertolak dari analisis terhadap tiga dimensi keadilan ini, Fraser mengajukan prinsip normatif yang disebutnya sebagai paritas partisipasi, yaitu sebuah kondisi ketika seseorang bisa berpartisipasi secara penuh di arena interaksi sosial. Akan tetapi, menghadapi globalisasi, prinsip paritas partisipasi juga menghadapi tantangan. Pertanyaan mengenai siapa yang berhak terlibat dalam paritas partisipasi mengemuka. Dalam hal ini, Fraser lalu mengemukakan apa yang disebutnya prinsip *all-subjected*. Melampaui pengertian keanggotaan kewarganegaraan politik dalam pengertian negara-bangsa Westphalian di satu sisi dan kemanusiaan kosmopolitan di sisi yang lain, prinsip *all-subjected* diyakini oleh Fraser lebih mampu memberi kerangka normatif dalam menilai klaim keadilan berdasarkan pengalaman kongkret masyarakat kapitalis.

Isu tentang ruang publik dibahas pada bab 4. Meski mengakui bahwa Habermas memberi sumbangan penting bagi pemahaman kita dalam mengurai relasi yang rumit antara negara, pasar, masyarakat sipil, dan keluarga, teoretisasinya dinilai Fraser mengabaikan aspek gender dan kelas sosial. Secara lebih detail Fraser menunjukkan pengabaian Habermas dalam empat hal, yaitu ketimpangan sosial, keragaman publik, dunia privat, serta relasi antara masyarakat sipil dan negara, yang pada intinya bersumber dari pemisahan yang tajam antara latar belakang dan latar depan masyarakat kapitalis. Problematik ini semakin krusial ketika globalisasi menantang teori ruang publik yang terbatas pada pengandaian negara-bangsa Westphalian. Menurut Fraser, pemisahan yang tajam tersebut berdampak pada normalisasi relasi publik transnasional yang timpang antara negara-negara kaya di belahan bumi Utara dan negara-negara miskin di bagian bumi Selatan. Sebagai

alternatifnya, Fraser mengajukan suatu teoretisasi ruang publik yang mampu melintasi batas-batas tersebut dengan harapan agar potensialitas yang secara imanen berada di latar belakang masyarakat kapitalis bisa terangkat dan kemudian menjadi sumber bagi emansipasi.

Sama dengan keadilan, analisis terhadap ruang publik dalam perspektif feminisme kritis tetap membutuhkan prinsip normatif. Sejalan dengan itu, Fraser mengajukan prinsip paritas partisipasi sebagai kriteria untuk menilai “bagaimana” pelembagaan keadilan bisa dilakukan di ruang publik. Dalam hal ini Fraser menambahkan prinsip inklusivitas yang bekerja secara simultan dengan prinsip paritas partisipasi untuk menentukan “siapa” yang berhak atau tidak berhak terlibat dalam proses partisipasi. Namun masalahnya, kedua prinsip ini lahir dari konteks negara-bangsa Westphalian. Oleh karena itu, sama seperti dalam perdebatan tentang teori keadilan, Fraser mengajukan prinsip *all-subjected* sebagai proposal normatif yang bisa digunakan di ruang publik transnasional. Pokoknya siapapun yang tunduk pada sistem kepengaturan tertentu mempunyai validitas untuk berpartisipasi, termasuk aturan main sistem kepengaturan yang membingkai mereka.

Bab 5 telah membahas pengejawantahan feminisme kritis Fraser isu negara kesejahteraan. Mendasarkan diri pada pengalaman Amerika Serikat, Fraser menunjukkan asumsi-asumsi gender dan kelas dalam proses pengambilan kebijakan kesejahteraan. Asumsi-asumsi ini dinaturalisasi sedemikian rupa, sehingga merugikan para pekerja non-upahan di ruang domestik, yang umumnya terdiri dari perempuan. Asumsi-asumsi ini juga menimbulkan problematik paradigma pencari nafkah dan pengasuh yang merugikan perempuan dan juga laki-laki dari kelas bawah. Feminisme kritis Fraser mengangkat problematik ini dengan melihat potensi emansipatif di antara

kekuatan pasar dan kemampuan masyarakat. Bertolak dari, tetapi juga berbeda dengan, Polanyi, Fraser berusaha melihat relasi di antara pasar dan masyarakat secara kritis, bukan dalam relasi yang oposisional melainkan saling terkait. Bersamaan dengan itu, Fraser juga memperlihatkan pentingnya kuasa publik dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan kesejahteraan, tetapi kuasa tersebut sekarang mengalami krisis seiring dengan krisis kapitalisme neoliberal.

2.3. Relevansi bagi Indonesia

Teoretisasi multidimensional Fraser mengenai redistribusi, rekognisi, dan representasi berguna dalam menerangi kompleksitas permasalahan kewarganegaraan di Indonesia. Kecenderungan untuk melebihkan identitas daripada kelas sebagaimana terjadi dalam perdebatan teori keadilan di Barat juga menggejala di sini. Oleh karena itu, penggunaan konsep status yang merujuk tidak hanya pada misrekognisi kultural tetapi juga maldistribusi struktural membantu kita dalam memahami dan mengatasi persoalan ketidakadilan di Indonesia. Sementara itu, konsepsi publik-tandingan *subaltern* Fraser bisa membantu kita dalam memahami gejala-gejala kepublikan di Indonesia yang majemuk, termasuk dalam menanggapi gagasan feminisme Islam yang mau mendialogkan feminisme dan Islam di tengah masyarakat multikultural. Terakhir, teoretisasi Fraser yang terkait dengan negara kesejahteraan memberikan kepada kita suatu perspektif yang kuat untuk mengerti krisis kepengasuhan saat ini. Di Indonesia, meski bentuk negara kesejahteraan seperti di negara industri maju tidak pernah eksis, perspektif tersebut berguna untuk membongkar ketidakadilan dalam program-program kesejahteraan yang berlandung di balik asumsi-asumsi gender dan kelas sosial tertentu

3. PENUTUP

3.1. Catatan

Tentu saja pemikiran Fraser mempunyai keterbatasan. Refleksinya mengenai sejarah feminisme gelombang kedua tidak akurat. Dia melihat feminisme gelombang dari suatu sudut pandang feminisme sosialis yang terbatas. Hal ini terjadi karena Fraser sendiri tidak mengelaborasi teorinya mengenai latar depan dan latar belakang kapitalisme, antara faktor-faktor produksi ekonomi dan faktor-faktor reproduksi sosial. Meski telah berusaha untuk keluar dari kecenderungan ekonomisme yang sering diidap oleh para pemikir Kiri, analisis Fraser tetap hanya terfokus pada bagaimana faktor-faktor produksi ekonomi membentuk tatanan reproduksi sosial dan bukan sebaliknya. Kiranya belum terlalu jelas bagi kita bagaimana gender dan berbagai tatanan sosial terlembagakan lainnya yang berada di latar belakang kapitalisme, termasuk agama, diartikulasikan secara kongkret dalam skema kelembagaan tertentu sedemikian sehingga bisa dijadikan sumber bagi emansipasi.

Keterbatasan Fraser tersebut adalah tantangan bagi penelitian lebih lanjut. Studi ini telah membuka jalan dengan mengetengahkan karya-karya Fraser, membingkainya dalam konsepsi feminisme kritis, dan memperlihatkan relevansinya baik secara teoretis maupun praktis bagi Indonesia. Meski demikian, catatan di atas memberi petunjuk bahwa pemikiran Fraser masih terbuka untuk dikaji dan dikembangkan.

3.2. Kesimpulan

Studi ini memperlihatkan bahwa secara normatif kritik kapitalisme membutuhkan analisis gender dan analisis gender tidak bisa dipisahkan dari kritik kapitalisme. Selain itu, bertolak dari karya-karya Fraser dan literatur-literatur terkait lainnya, studi ini juga menunjukkan bahwa secara historis gender adalah

syarat kemungkinan bagi kapitalisme. Kapitalisme tidak akan berjalan tanpa tatanan gender di belakangnya. Dengan argumen ini, Fraser memperlihatkan bahwa dalam perdebatan mengenai keadilan, ruang publik, dan negara kesejahteraan terdapat asumsi-asumsi gender yang turut mendukung keberlanjutan kapitalisme. Akan tetapi, dalam sejarah, relasi antara gender dan kapitalisme berjalan timpang. Yang pertama hanya diekspropriasi dan dieksploitasi untuk kepentingan yang kedua. Kontradiksi ini membuat kapitalisme mengalami krisis. Sejatinya krisis adalah momentum bagi perubahan. Ketika terjadi krisis, hegemoni-tandingan dimungkinkan. Namun, sayangnya, para feminis yang sejak awal berjuang demi keadilan gender gagal menangkap momentum itu.

Kegagalan para feminis tersebut, juga para pemikir dan aktivis sosial lainnya, disituasikan oleh ketidakmampuan mereka dalam membaca gerak sejarah, khususnya apa yang dikenal sebagai belokan kultural (*cultural turn*) dan belokan global (*global turn*). Neoliberalisme yang menggeser model kapitalisme yang dikelola negara di era sebelumnya telah membelokan pandangan teori sosial dan filsafat politik dari isu ketimpangan sosial ke keragaman kultural. Pembelokan ini membuat pertanyaan-pertanyaan keadilan di ruang publik kita lebih didominasi oleh kebutuhan akan realisasi diri daripada perombakan struktur ekonomi-politik. Yang ditekankan kemudian adalah meritokrasi individual, bagaimana agar diri bisa mencapai sukses, bukan kesetaraan ekonomi-politik. Gejala ini mengemuka dalam berbagai kebijakan publik di mana sebagian feminis arus utama ikut serta di dalamnya. Namanya memang kebijakan publik, tetapi tanggung jawab negara di dalamnya digantikan oleh perusahaan swasta atau bahkan individu masing-masing. Inilah yang bisa dilihat dalam berbagai skema politik kesejahteraan yang masih jauh dari pemerataan.

Fraser mengajak para feminis dan teoretisi kritis lainnya, selain para aktivis sosial, untuk melihat kembali secara lebih komprehensif berbagai problematik struktural masyarakat kapitalis. Ajakan ini tentunya mensyaratkan reorientasi intelektual yang selama beberapa dekade terakhir didominasi oleh pendekatan-pendekatan kultural yang bias kelas—secara praktis hanya menguntungkan kelas elit. Dengan reorientasi intelektual ini suatu solidaritas lintas kelas menjadi mungkin, sehingga para feminis, pegiat lingkungan, advokat masyarakat adat, hingga para penceramah yang giat mengkampanyekan moderasi beragama bisa duduk bersama, saling berbincang, mengatasi problematik yang ditimbulkan oleh kontradiksi kapitalisme. Yang menyatukan mereka bukan kesamaan identitas, melainkan suatu visi masyarakat demokratis menuju keadilan sosial.

Bagi kita di Indonesia, pemikiran Fraser tidak diragukan lagi sangat menantang. Para feminis liberal arus utama mesti memperhatikan kritiknya. Pandangan bahwa feminisme hanya soal kesetaraan dalam pengertiannya yang sempit, misalnya sebatas keterwakilan di lembaga legislatif, sulit dipertahankan mengingat masalah gender bersumber pada hal yang lebih fundamental, yaitu struktur ekonomi-politik kapitalisme. Di tengah masyarakat yang sedemikian timpang secara sosial dan ekonomi, kuota perempuan di lembaga legislatif yang dikampanyekan feminisme liberal ternyata lebih bisa diakses oleh perempuan dari kalangan elit daripada oleh perempuan kalangan bawah. Tidak ada representasi tanpa redistribusi. Di sisi lain, keprihatinan Fraser terhadap kecenderungan politik rekognisi yang hanya berbasis politik identitas juga sangat krusial. Dalam hal ini, kampanye feminisme Islam yang selalu menekankan kritik wacana agama, bahwa seolah-olah masalah perempuan melulu bersumber pada penafsiran yang salah

terhadap kitab suci tanpa menengok sumber masalah yang struktural, mesti dilihat secara lebih kritis sebagai bagian dari proyek neoliberal.

Pada akhirnya, alih-alih memberikan jawaban tuntas, studi ini lebih berharap membuka jalan bagi pertanyaan lebih lanjut. Sebagai sebuah bentuk kritik kapitalisme, pemikiran Fraser dibangun di atas fondasi filsafat politik dan teori sosial yang solid. Berangkat dari tradisi intelektual yang berkembang di kalangan feminis sosialis dan teori kritis Mazhab Frankfurt, Fraser mengangkat permasalahan yang krusial bagi kita di awal abad ke-21. Mengikuti peringatan yang dikemukakan oleh Horkheimer di tahun 1930-an, Fraser telah berupaya merumuskan suatu kritik yang tidak “terbelit” (*entanglement*) logika kapital yang mau dikritiknya. Upaya ini, yang dalam sejarah pemikiran disebut kritik imanen, sungguh sangat berharga tidak hanya secara teoretis, tetapi juga secara politis. Di tengah ambivalensi gerakan sosial saat ini, terutama feminisme, rumusan feminisme kritis Fraser kiranya bisa berkontribusi bagi—meminjam kata-kata Karl Marx pada 1843—“klarifikasi diri perjuangan dan keinginan zaman”.

Ucapan Terima Kasih

Studi ini bisa diselesaikan karena bantuan berbagai pihak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno yang pada periode awal bertindak sebagai pembimbing dan kemudian menjadi penguji. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. J. Sudarminta yang meneruskan tugas bimbingan bersama dengan Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno. Sementara itu, Dr. Karlina Supelli sejak awal telah melancarkan kritik dan memberikan masukan berharga bagi penulisan karya ini. Terima kasih, Ibu! Ucapan yang sama saya haturkan kepada Dr. Syafiq Hasyim dan Dr. Simon Petrus

L. Tjahyadi yang terlibat dalam tiga kali ujian secara berturut. Kepada teman-teman di STF Driyarkara, khususnya Mbak Therisia Asih di program S3 yang membantu kelancaran administrasi, teman-teman di LIPI (sekarang BRIN), dan teman-teman di Unusia yang suka ziarah kubur dan makan nasi biryani, saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya.

Riwayat Hidup

Amin Mudzakkir lahir di Tasikmalaya, 27 Juli 1983. Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di kota kelahirannya, dia melanjutkan dan menamatkan kuliah sarjana (S1) di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM pada 2005. Sejak 2006 hingga sekarang bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sekarang berubah nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada 2015 mendapatkan gelar magister (S2) dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dengan menulis tesis tentang Seyla Benhabib. Minat kesariaannya meliputi kajian-kajian Indonesia dan sejarah pemikiran sosial politik. Di antara publikasi terbarunya: Amin Mudzakkir, “Krisis Kepedulian dan Kapitalsime dalam Pemikiran Nancy Fraser”, *Respons: Jurnal Etika Sosial*, Vol. 23, No. 2, 2018; Amin Mudzakkir, “Pengendalian Massa dalam Pemikiran Gustave Le Bon,” *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, Vol 3. No. 1, 2019; Amin Mudzakkir, “Perseteruan Memori Kolektif: Kontestasi Islam dan Politik di Tasikmalaya Pasca-Orde Baru”, *Dinika*, Vol. 4, No. 3, 2019; Amin Mudzakkir, “Traditional Islam and Global Religious Connectivity: Nahdlatul Ulama in the Netherlands”, *Islam Nusantara*, Vol. 1, No. 1, July 2020; Amin Mudzakkir dan Ahmad Najib Burhani, “Identity Politics: Resoundingly Absent from the 2020 Regional Election in Tasikmalaya”, *Perspective*, ISEAS Yusof Ishak Institute, Issue 2021, No. 45.

Selain bekerja sebagai peneliti di BRIN, Mudzakkir juga mengajar di Program Pascasarjana Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta, dan aktif di Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU).

